

PENETAPAN
PERUBAHAN



20
25

RENJA

[Rencana Kerja]

Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin

JALAN BUPATI OESMAN BAKAR, KELURAHAN KAYUARA, KECAMATAN SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT karena dengan izinnya, penyusunan dokumen Penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan serta anggaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka mencapai sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra). Sebagaimana Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, setiap daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Demikianlah dokumen ini dibuat untuk menggambarkan proses perencanaan yang telah dilakukan dalam penyusunan Penetapan Perubahan RENJA Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, serta dalam rangka mendukung keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan dan keberlanjutan kebijakan perencanaan pembangunan di sektor perikanan.

Sekayu, 26 Juni 2025

**Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Musi Banyuasin**



Hendra Tris Tomy, S.STP, M.Ec.Dev

Pembina Utama Muda

NIP. 19770902 199602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PERIKANAN
Jl. Bupati Oesman Bakar Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu
Telepon / Fax. 0714 - 321226 Kode Pos 30711
Email : dinasperikanan@gmail.com Website : disperik.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : B-500.5/69/KPTS/DISKAN/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPd dan untuk adanya tolak ukur pencapaian program di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka perlu adanya program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 sesuai Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor B-000.7.2.4/069/BAPPEDA/2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai tidak lanjut terhadap penyesuaian Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah pada Perubahan RKPd Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, untuk menjadi acuan dalam penyusunan Renja Tahunan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah dan adanya hasil evaluasi perkembangan kondisi di

Daerah maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan;

- c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b diatas, Penetapan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

- Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 8);
 10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 284 Tahun 2021, tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 284);
 11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
 12. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 27);
 13. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 67) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 1) ;
 14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;

15. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Nomor 523/50/DISKAN/I/III/2022 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin 2023 – 2026.

M E M U T U S K A N

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin 2025 dengan susunan keanggotaan terlampir.
- KEDUA : Lingkup tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin 2025 adalah sebagai berikut :
1. Mengkaji dan mengevaluasi Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
 2. Mempelajari visi, misi dan perencanaan yang telah ditetapkan Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin;
 3. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
 4. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk Menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
 5. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
 6. Menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
- KETIGA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025,

bertanggung jawab terhadap penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 11 Maret 2025

Kepala Dinas Perikanan,

Hendra Tris Tomy, S.STP, M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda

NIP. 19770902 199602 1 001

Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor : B-500.5/69/KPTS/DISKAN/2025

Tanggal : 11 Maret 2025

Tentang : Penetapan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin.

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perikanan
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perikanan
3	Anggota	Kepala Bidang Perikanan Budidaya Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepala Bidang Usaha Perikanan Kepala Bidang Sumber Daya Ikan JF Perencana Ahli Muda JF Analis Keuangan Daerah/Pusat Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kepala Balai Benih Ikan (BBI) Fungsional Dinas Perikanan

Kepala Dinas Perikanan,



Hendra Tris Tomy, S.STP, M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda
NIP. 19770902 199602 1 001

Lampiran II

Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor : B-500.5/69/KPTS/DISKAN/2025

Tanggal : 11 Maret 2025

Tentang : Penetapan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin.

**Tahapan dan Jadwal Penyusunan Rencana Kerja (P-Renja)
Tahun 2025**

No	Tahapan	Jadwal			
		Maret	April	Mei	Juni
1.	Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Kerja	✓	✓		
2.	Verifikasi dan Asistensi Ranwal Perubahan Renja dengan Bidang Mitra Bappeda		✓		
3.	Input hasil verifikasi Ranwal Renja ke SIPD-RI		✓		
4.	Rapat Teknis Pembahasan Usulan P-RKPD		✓		
5.	Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja			✓	✓
6.	Verifikasi dan Asistensi Ranhir				✓
7.	Review Perubahan Renja Akhir oleh APIP				✓
8.	Penetapan Perubahan Renja				✓

Sekayu, 11 Maret 2025

Kepala Dinas Perikanan,



Hendra Tris Tomy, S.STP, M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda

NIP. 19770902 199602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PERIKANAN
Jl. Bupati Oesman Bakar Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu
Telepon / Fax. 0714 - 321226 Kode Pos 30711
Email : dinasperikanan@gmail.com Website : disperik.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : B-500.5/76/KPTS/DISKAN/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan untuk adanya tolak ukur pencapaian program di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka perlu adanya program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 untuk menjadi acuan dalam penyusunan Renja Tahunan.
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah dan adanya hasil evaluasi serta perkembangan kondisi di Daerah maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan;

- c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b diatas, Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025.

Mengingat : 1. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 284 Tahun 2021, tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 284);
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 27);
13. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 67) sebagaimana telah

dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 1) ;

14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Nomor 523/50/DISKAN/I/III/2022 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin 2023 – 2026.
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Nomor 523/50/DISKAN/I/III/2022 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin 2023 – 2026;
17. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Nomor: 523/11/DISKAN/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

KESATU : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin 2025 dengan susunan keanggotaan terlampir.

Disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah
Triwulan I Tahun 2025

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat
daerah

Bab IV Penutup

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan
Kabupaten Musi Banyuasin dimaksud dalam
diktum KEDUA, sebagaimana terlampir, merupakan
lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 26 Juni 2025

**Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Musi Banyuasin,**



**Hendra Tris Tomy, S.STP, M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda**

NIP. 19770902 199602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA ...	iii
SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN RENCANA KERJA	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	13
2.1 Evaluasi Renja PD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4 Review Terhadap RKPD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	38
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	40
BAB IV PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin.....	14
2.	Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin	25
3.	Tabel 2.3	Review Rancangan Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Musi Banyuasin.....	30
5.	Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Musi Banyuasin..	39
6.	Tabel 3.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Penetapan Perubahan RENJA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari tujuan dan sasaran Program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Penetapan Perubahan RENJA Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025.
3. Penetapan Perubahan RENJA Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.

Mengingat arti strategis Perubahan RENJA Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Penetapan Perubahan RENJA pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada perkiraan pencapaian RENSTRA sampai dengan Tahun berjalan;
2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026;
3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kabupaten;
4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan indikator hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dasar Pertimbangan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2025, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD.

Dalam penyusunan Penetapan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 ini telah melalui beberapa tahapan :

1. Persiapan Penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja
Persiapan penyusunan dilakukan dengan melengkapi dokumen-dokumen perencanaan yang terkait dengan penyusunan Penetapan Perubahan Renja, antara lain Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin periode 2023 - 2026, LKJiP PD tahun 2024 dan RKPD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

2. Penyusunan Rancangan Penetapan Perubahan Rencana Kerja

Penyusunan Rancangan Penetapan Perubahan Renja dilakukan dengan sinkronisasi antara Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin periode 2023 - 2026 dengan RPD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026, dengan melibatkan seluruh unit kerja pada lingkup Dinas Perikanan untuk mendapat kesepakatan sebagai komitmen awal dalam penentuan prioritas program dan kegiatan pada tahun 2025.

3. Penetapan Rencana Kerja

Penetapan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan oleh Bupati Musi Banyuasin setelah diverifikasi oleh BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin guna sinkronisasi Rancangan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dengan RKPD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimana tahun anggaran 2025 merupakan tahun ketiga setelah ditetapkannya RPD Kabupaten Musi Banyuasin 2023-2026, maka kami menyusun Penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah TA.2025 Dinas Perikanan masuk dalam tujuan menguatkan ekonomi daerah untuk mendorong transformasi ekonomi dengan 1 (satu) indikator tujuan yakni mengenai Pertumbuhan ekonomi dimana terdapat 2 (dua) sasaran yang dituju pertama meningkatnya produktifitas sektor pertanian dan perikanan, sasaran kedua meningkatnya kontribusi usaha mikro, IKM dan industri pengolahan pada perekonomian daerah, dengan 2 (dua) indikator sasaran: 1. Laju pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan (ADHK); 2. Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan (ADHK).

Kabupaten Musi Banyuasin dengan segala potensi yang ada memiliki kekayaan kandungan sumber daya alam, seperti tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan minyak, gas bumi, dan batubara; mempunyai daya dukung lahan yang tinggi; memiliki lokasi perekonomian yang strategis dengan *hinterland* ibukota Provinsi dan mempunyai lingkungan sosial budaya potensial yang memiliki karakteristik spesifik selain itu Kabupaten Musi

Banyuasin merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan yang memiliki potensi perikanan perairan umum yang besar. Hal tersebut tercermin salah satunya pada banyaknya sungai besar yang melewati Kabupaten ini, yaitu Sungai Musi, Sungai Lalan dan Sungai Batanghari Leko, serta ditambah dengan banyak sungai kecil lainnya. Jenis-jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi banyak terdapat di perairan umum Kabupaten Musi Banyuasin, misalnya baung, gabus, botia, belida, jelawat dan lain-lain.

Perikanan budidaya di Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi yang besar. Jenis pembudidayaan yang umum dilakukan adalah kolam air tenang, budidaya mina padi di sawah, keramba, pen sistem dan tambak. Jenis-jenis ikan yang dibudidayakan juga bervariasi. Berkembangnya budidaya perikanan di Kabupaten Muba dipengaruhi oleh banyaknya lahan yang tersedia. Berdasarkan produksi perikanan Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2024 adalah sebesar 37.339,17 ton. Produksi tersebut berasal dari perairan umum sebesar 24.511,28 ton dan budidaya sebesar 12.094,86 ton. Produksi perikanan tangkap kontribusi paling besar berasal dari perairan umum.

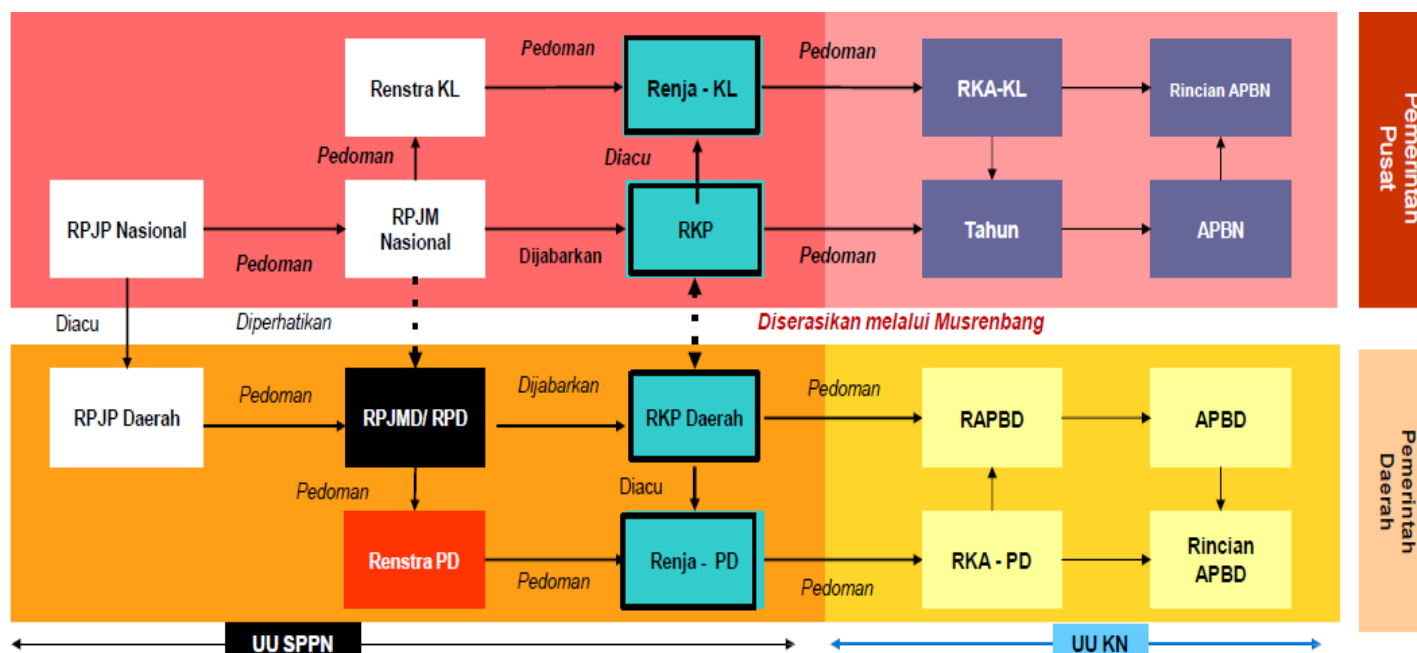
Pembangunan sektor perikanan di masa yang akan datang diarahkan pada produksi budidaya, sesuai dengan paradigma pembangunan perikanan yang mengarah kepada usaha budidaya ikan dan membatasi eksploitasi penangkapan ikan di alam dimana potensi tambak dalam Kabupaten Musi Banyuasin mencapai 86.740 hektar, yang telah dimanfaatkan sekitar 84 hektar, lahan dataran rendah 337.166 hektar yang sangat cocok untuk kegiatan budidaya perikanan, daerah aliran sungai sekitar 650 km yang dialiri 7 (tujuh) sungai besar (Sungai Musi, Batang hari leko, Lalan, Bayat, Merang, Dawas, Tungkal) dengan anak sungai mencapai 1.057 buah, 6 (enam) buah danau dengan luas mencapai 329.5 ha yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan produktif perikanan. Pembangunan sektor perikanan, khususnya sektor penangkapan ikan didukung oleh nelayan kecil berjumlah 13.561 orang.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023–2026, merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang perikanan di Kabupaten Musi Banyuasin selama periode 4 (empat) tahun yang

merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Dinas Perikanan. Dokumen ini memuat arah dan kebijakan serta strategi pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai instansi (PD) yang bertanggung jawab dalam pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Adapun hubungan renja dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1. berikut ini.

Gambar 1. 1 Hubungan RENJA Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Kabupaten Musi Banyuasin dengan segala potensi yang ada mempunyai peluang yang sangat menjanjikan untuk dapat menjadi daerah yang maju dan lebih sejahtera di Indonesia. Dalam RPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026 ditetapkan bahwa tujuan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin 4 (empat) tahun ke depan yang selaras dengan Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin yakni dalam penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta pertumbuhan dan peningkatan ketahanan ekonomi .

Adapun makna yang terkandung dari tujuan Kabupaten Musi Banyuasin 2023–2026 yang berhubungan dengan Dinas Perikanan adalah : terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan indikator tujuan yakni angka

kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, dimana kondisi masyarakat yang sejahtera melalui terciptanya peningkatan perekonomian rakyat dan peningkatan pendapatan daerah yang optimal.

Berkaitan dengan tujuan tersebut Konsep Pemerintahan Otonomi Daerah telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerintah, swasta, serta memperkuat keanekaragaman potensi daerah.

Guna mengembangkan daerah perlu mengerahkan semua potensi baik topografi, sumber daya alam, sumber daya manusia, kependudukan, sosial budaya, dan pemerintahan, sehingga setiap kondisi akan saling berintegrasi, untuk itu hal – hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya perlu direncanakan agar kegiatan yang satu tidak mengakibatkan dampak negatif bagi kegiatan lain, paling tidak meminimalisir pengaruh yang tidak diinginkan. Oleh karena itu tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian harus secara nyata dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab sehingga akan mendorong perencanaan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan melihat jauh kedepan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Apabila penyusunan perencanaan disusun dengan mengenyampingkan keseimbangan dan jauh dari konsep logis serta tidak bertitik tolak dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat, maka dalam proses pelaksanaannya nanti akan mengalami stagnasi yang cukup signifikan.

Pengorganisasian penyelenggaraan perencanaan dan program pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Mengkaji, menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan jangka menengah dan jangka Panjang;
- b. Menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan program-program pembangunan Daerah ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;

- c. Melakukan koordinasi dalam rangka keserasian pembangunan wilayah dan merancang kerjasama dengan pihak dalam negeri dan luar negeri, serta membina, memelihara dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- d. Mengelola data dan informasi Pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang membutuhkan data dan informasi pembangunan;
- e. Menyusun laporan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan Daerah, memantau pelaksanaannya, melakukan pengumpulan, pengelolaan dan analisis data pembangunan dalam rangka mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Selanjutnya dalam perencanaan pembangunan, tujuan utama dari hasil yang hendak dicapai adalah :

- a. Tetap berlangsungnya perkembangan sosial ekonomi
- b. Meningkatnya pendapatan perkapita
- c. Perubahan struktur ekonomi
- d. Memperluas kesempatan kerja
- e. Peningkatan pemerataan pembangunan
- f. Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat yang didasari kemampuan daerah menuju stabilitas ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Penetapan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 543);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
9. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 284 Tahun 2021, tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 284);
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 27);
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Nomor 523/50/DISKAN/I/III/2022 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin 2023 – 2026;
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Nomor: 523/11/DISKAN/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Adapun maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 adalah :

1. Menjadi acuan / dasar dalam merencanakan dan menentukan Langkah langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Menyediakan dokumen resmi dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan pada tahun 2025 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.
3. Memuat pengukuran kinerja sebagai pelaksanaan akuntabilitas dan integritas organisasi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Penetapan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 adalah guna mendapatkan target capaian yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi terakhir, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

1. Sebagai suatu acuan resmi bagi instansi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin dalam pelaksanaan pembangunan sektor perikanan dan kelautan dalam periode tahun 2025.
2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencana dalam perumusan substansi perencanaan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan difokuskan pada pencapaian target dan sasaran, guna efektifitas dan efisiensi pembangunan dengan mengacu pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026 dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang.

3. Menyediakan tolok ukur yang diperlukan dalam evaluasi kinerja tahunan Dinas Perikanan.
4. Memudahkan pencapaian tujuan pembangunan melalui penetapan strategi dan kebijakan yang terarah.
5. Memudahkan pemahaman arah kebijakan pembangunan melalui penetapan program dan kegiatan operasional tahunan dengan indikator kinerja yang terukur.
6. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi.
7. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar instansi dan sektor.

1.3.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar Pertimbangan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2025, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi :

- a. Hasil evaluasi terhadap capaian yang menunjukkan perlunya penyesuaian untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
- b. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD;
- c. Keadaan yang menyebabkan harus pergeseran anggaran, antara kegiatan, dan antar jenis belanja;
- d. Adanya usulan baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
- e. Adanya penyesuaian isu strategis, prioritas daerah, target indikator makro, visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2030 yang perlu diakomodir Tahun 2025;
- f. Dalam rangka meningkatkan target capaian IKU;

- g. Adanya ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta pasal 25 ayat (2) UU Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD, termasuk Perubahan APBD Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Rencana Kerja disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan penetapan perubahan Rencana Kerja, landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan sistematika dokumen perubahan Rencana Kerja.

BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan I (satu) dan permasalahan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program dan kegiatan tahun 2025, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Secara rinci disajikan kegiatan tahun 2025, pergeseran antar Kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menampilkan kesimpulan dan memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Renja PD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Untuk melakukan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan triwulan I, yang dimana secara umum Perubahan Renja 2025 selaras dengan Renja 2025, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan penundaan pelaksanaan kegiatan dikarenakan kebijakan daerah dan keterbatasan anggaran pada triwulan I, diharapkan penundaan ini dapat dilaksanakan pada triwulan II. Akan tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2025, tetap diusulkan kembali pada tahun 2026 dan apabila kegiatan tersebut dapat dilaksanakan maka akan dilakukan usulan perubahan pada anggaran tahun 2025.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Dinas Perikanan sampai dengan triwulan I tahun 2025 secara umum belum dilaksanakan dengan optimal dan belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Akan tetapi tidak seluruh kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan sehingga diperlukan Perubahan Renja. Adapun penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada perubahan ini disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya prioritas kegiatan yang harus dilaksanakan.
2. Adanya pergeseran kegiatan.
3. Adanya penambahan dan pengurangan target capaian kinerja.
4. Adanya penambahan kelompok sasaran.
5. Adanya penambahan pagu indikatif.

Tabel 2.2
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

N o.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun....)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		unit Perang kat Daera h Penan ggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
	Terpenuhi nya Kebutuha n Penunjan g Pelaksana an Bidang Urusan Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel	100%		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100%		
			Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran	100%		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100%		
			Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100%		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100%		
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100%		
1.		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokum en	240,000,000	8 Doku men	66,493,000	4 Doku men	42,338,000	1 Doku men	4,312,100	1 Doku men	4,312,100	8 Doku men	70,805,100	1.6	0.30	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	240,000,000	8 Laporan	36,036,000	4 Laporan	8,775,000	1 Laporan	0	1 Laporan	0	8 Laporan	36,036,000	1.6	0.15	
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	2 Data	68,945,000	-	0	1 Data	9,024,000	-	-	-	-	-	0	-	0.00	
2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160 Orang	25,700,000,000	72 Orang	9,581,634,242	90 Orang	5,603,881,103	37 Orang	940,948,548	37 Orang	940,948,548	74 Orang	10,522,582,790	14.8	0.41	
3.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100%		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	36 Dokumen	400,000,000	10 Dokumen	97,283,018	5 Dokumen	52,371,000	5 Dokumen	0	5 Dokumen	0	10 Dokumen	97,283,018	2	0.24	
4.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%						100 %		100 %		100 %		100%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	800,000,000	1 Paket	26,588,000		-	-	0	-	0	1 Paket	26,588,000	0.2	0.03	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	400,000,000	4 Orang	72,966,205		100,885,000	-	0	-	0	11 Orang	72,966,205	2.2	0.18	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang	350,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	
5.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%						100 %		100 %		100 %		100%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 paket	450,000,000	2 Paket	53,562,000	1 Paket	65,724,080	-	0	-	0	5 paket	53,562,000	1	0.12	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	500,000,000	3 Paket	629,695,486	1 Paket	99,253,498	-	0	-	0	3 paket	629,695,486	0.6	1.26	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	300,000,000	2 Paket	73,153,750	1 Paket	53,245,105	1 Paket	5,913,000	1 Paket	5,913,000	2 Paket	79,066,750	0.4	0.26	

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	510,000,000	2 Paket	370,825,100	1 Paket	97,819,780		0		0	2 Paket	370,825,100	0.4	0.73	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	260,000,000	2 Paket	88,773,000	1 Paket	36,555,852	1 Paket	3,791,700	1 Paket	3,791,700	4 Paket	92,564,700	0.8	0.36	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen	240,000,000	6 Dokumen	60,300,000	-	-		0		0	6 Dokumen	60,300,000	0.2	0.25	
		Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	120,000,000	1 Paket	40,000,000	1 Paket	40,680,000	-	0	-	0	1 Paket	40,000,000	0.2	0.33	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 laporan	240,000,000	21 laporan	55,765,000	12 laporan	35,780,369	1 laporan	4,185,000	1 laporan	4,185,000	24 laporan	59,950,000	4.8	0.25	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 laporan	1,700,000,000	24 laporan	766,484,715	12 laporan	139,861,000	3 laporan	67,179,935	3 laporan	67,179,935	24 laporan	833,664,650	4.8	0.49	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	300,000,000	2 Dokumen	70,360,700	1 Dokumen	134,659,700	-	0	-	0	2 Dokumen	70,360,700	0.4	0.23	
6.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%						100 %		100 %		100 %		100%		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	1,200,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	
		Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	4 Unit	1,900,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	120 Unit	400,000,000	64 Unit	316,239,869	1 Unit	49,158,001	-	0	-	0	64 Unit	316,239,869	12.8	0.79	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 unit	200,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	300,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	900,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	300,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	

7.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1,905,600,000	24 Laporan	575,736,220	12 Laporan	205,458,600	3 Laporan	59,359,670	3 Laporan	59,359,670	13 Laporan	635,095,890	2.6	0.33	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	5,494,400,000	24 Laporan	2,653,988,797	12 Laporan	946,920,000	2 Laporan	190,800,000	2 Laporan	190,800,000	24 Laporan	2,844,788,797	4.8	0.52	
8.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44 Unit	1,200,000,000	14 Unit	648,347,412	11 Unit	340,609,700	6 Unit	65,862,165	6 Unit	65,862,165	16 Unit	714,209,577	3.2	0.60	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	4 Unit	400,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	200,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	400,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	1,100,000,000	3 Unit	481,428,781	1 Unit	69,978,000	-	0	-	0	3 Unit	481,428,781	0.6	0.44	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	700,000,000	47 Unit	50,408,000	54 Unit	40,130,000	-	0	-	0	97 Unit	50,408,000	19.4	0.07	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	700,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	4 Ha	700,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	
	Meningkatnya Produksi Perikanan	Program Pengolahan Perikanan Tangkap																

9.		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	100%						100 %		100 %		100 %		100%		
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang	12 Dokum en	2,200,000,000	2 Doku men	334,246,140	-	72,727,800	-	16,749,300	-	16,749,300	6 Doku men	350,995,440	1.2	0.16	
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	540 Unit	11,900,000,000	1.841 Unit	3,836,787,112	-	2,450,674,250	-	0	-	0	1730 Unit	3,836,787,112	346	0.32	
		Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit			0	-	0	-	149,071,000	-	149,071,000	-	149,071,000	-		
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	4 Kegiat an	2,700,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	
10 .		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%						100 %		100 %		100 %		100%		
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil Yang Meningkatkan Kapasitasnya	2000 Orang	2,100,000,000	62 Orang	1,649,342,908	-	110,230,050	-	2,667,100	-	2,667,100	500 Orang	1,652,010,008	100	0.79	
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	16 Kelom pok	1,500,000,000	-	0	-	43,894,000	-	6,248,700	-	6,248,700	-	6,248,700	-	0.00	
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	40 Unit Usaha	1,400,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	
11 .		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	100%						100 %		100 %		100 %		100%		
		Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	12 Dokum en	1,200,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	

		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4 Layana n	1,350,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	
	Meningkatnya Produksi Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya																
12		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	100%						100%		100%		100%		100%		
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	100 Kelom pok	9,700,000,000	34 Kelom pok	3,061,641,086	-	517,895,500	-	0	-	0	33 Kelom pok	3,061,641,086	6.6	0.32	
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	60 Kelomp ok	600,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	12 Kelomp ok	600,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	
		Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	120 Kelom pok	1,173,000,000	12 Kelom pok	72,922,000	-	115,436,000	-	7,088,500	-	7,088,500	12 Kelom pok	80,010,500	2.4	0.07	
13		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100%						100%		100%		100%		100%		
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Dokum en	2,100,000,000	2 Doku men	514,731,685	-	0	-	0	-	0	2 Doku men	514,731,685	0.4	0.25	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	12 Unit	2,800,000,000	62 Unit	3,967,080,743	-	0	-	0	-	0	6 Unit	3,967,080,743	1.2	1.42	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;	8 Unit	2,050,000,000	12 Unit	691,431,730	-	1,792,526,806	-	0	-	0	16 Unit	691,431,730	3.2	0.34	

		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	4 Dokumen	900,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	2000 orang	800,000,000	1000 orang	310,875,610	-	86,578,000	50 orang	35,526,022	50 orang	35,526,022	1000 orang	346,401,632	200	0.43	
		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi.	20 Ha	400,000,000	5 Ha	288,248,350	-	0	-	0	-	0	5 Ha	288,248,350	1	0.72	
		Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	200 Unit	1,000,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	
	Meningkatnya Produksi Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan																
14		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	100%						100%		100%		100%		100%		
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Di Usahakan dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	9,900,000,000	2 Dokumen	1,023,816,916	-	0	-	0	-	0	2 Dokumen	1,023,816,916	0.4	0.10	
		Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota;	4 Dokumen	1,900,000,000	2 Dokumen	804,332,558	-	0	-	0	-	0	2 Dokumen	804,332,558	0.4	0.42	

		Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	100 Pelaku Usaha				50 Pelaku Usaha	306,588,500	-	8,365,508	-	8,365,508	-	8,365,508	-		
		Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	60 Pelaku Usaha				30 Pelaku Usaha	79,061,027	-	13,655,828	-	13,655,828	-	13,655,828	-		
		Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	260 Pelaku Usaha				180 Pelaku Usaha	343,883,493	-	17,625,820	-	17,625,820	-	17,625,820	-		
	Meningkatnya Produksi Olahan Sektor Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN																
15		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase ketersediaan data pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	100%						100%		100%		100%		100%		
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4 Dokumen	2,400,000,000	4 Dokumen	315,018,158	-	243,384,200	-	21,521,300	-	21,521,300	4 Dokumen	336,539,458	0.8	0.14	
16		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	100%						100%		100%		100%		100%		
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	1200 Unit Usaha	6,800,000,000	30 Unit Usaha	37,975,000	-	0	-	0	-	0	40 Unit Usaha	37,975,000	8	0.01	
17		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100%						100%		100%		100%		100%		

		Daerah Kabupaten/ Kota																
		Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten / Kota	Jumlah Peningkat ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	130 Ton	2,900,000,000	18 Ton	1,163,220,686	-	742,297,000	-	0	-	0	18 Ton	1,163,220,686	3.6	0.40	
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	800 Pelaku Usaha	2,500,000,000	80 Pelaku Usaha	1,670,178,377	-	558,971,127	-	39,248,677	-	39,248,677	80 Pelaku Usaha	1,709,427,054	16	0.68	

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I realisasi fisik dan Keuangan dibawah target yang di tentukan, data yang diinput dari Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin, penyerapan keuangan Belanja Langsung pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 15.637.255.264,- sampai Triwulan I (Januari–Maret) Tahun Anggaran 2025 terdapat penyerapan keuangan sebesar Rp. 1.660.116.873,- (10,6). Begitu juga untuk realisasi fisik kegiatan sebesar 13,33% dari target yang ditetapkan sebesar 25,45%.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I TA. 2025 dapat diidentifikasi faktor penghambat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Belum dimulainya proses pengadaan barang/jasa khususnya untuk kegiatan fisik
2. Terdapat efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga menyebabkan penundaan dan atau pembatalan beberapa kegiatan;
3. Adanya kegiatan yang memang secara prosedural dimulai pada Triwulan ke II;

Sedangkan faktor pendorong keberhasilan kinerja sebagai berikut:

1. Melengkapi proses persyaratan pemilihan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang memerlukan penyedia sehingga dapat segera dilaksanakan;
2. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan efisiensi anggaran agar menyesuaikan ketentuan dan jadwal perencanaan yang telah disusun dengan tetap memperhatikan pencapaian output kegiatan;
3. Memperhatikan dimulainya kegiatan yang secara procedural;
4. Agar dioptimalkan pencapaian realisasi fisik dan penyerapan keuangan per triwulan sesuai dengan anggaran kas dan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai keseimbangan antara realisasi fisik dan penyerapan keuangan;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sehubungan dengan kinerja pelayanan pemerintah daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalam pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Mengingat urusan kelautan dan perikanan merupakan urusan pilihan yang tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi kegiatan bidang perikanan. Namun demikian perlu kiranya ada suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja pelayanan organisasi.

Oleh karena itu, Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin menentukan indikator kinerjanya guna memenuhi kinerja pelayanan yang telah ditentukan sebagaimana tersebut di atas, didasarkan pada tupoksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masalah kepegawaian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 284 Tahun 2021. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin dilihat dari capaian kinerja berdasarkan RPD tahun 2023-2026 adalah sebagaimana tertera pada tabel 2.2 :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin

	Indikator	SPM / standar nasional	IKK / IKU	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2023	2024	Tahun 2025 Triwulan I	2024	2025	
				(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-1)	(thn n-2)		(thn n)	(thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	-	IKU	23,484	23,954	24,434	24,032.55	24,511.28	4,053.16	23,954	24,434	Sudah tercapai 16,58%, belum optimal karena adanya beberapa wilayah terdampak banjir dan penurunan RTP akibat alih profesi
2	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	-	IKU	25,772	26,813	12,119	27,321.04	12,094.86	2,660.56	26,813	27,349	Sudah tercapai 21,95%, belum optimal karena adanya beberapa wilayah terdampak banjir.
3	Tingkat Partisipasi Pokmaswas (%)	-	IKU	60	69	78	60	60	6	69	78	Sudah tercapai 7,69%, dikarenakan masih dalam proses persiapan kegiatan
4	Persentase Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan (%)	-	IKU	5	7	8	8.96	16.63	2	7	8	Hasil olahan 2% dari 31,95 Ton dari target 244,33 Ton, dikarenakan Ikan hasil tangkapan masih langkah atau sedikit, hal ini menyebabkan harga ikan hasil tangkapan masih tinggi. Hal ini dipicu oleh kondisi sungai-sungai di wilayah kabupaten Muba belum meluap/banjir, sehingga ikan-ikan hasil tangkapan hanya cukup untuk konsumsi segar.
5	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	-	IKU	52.44	53.76	54.97	47.64	49	-	53.76	54.97	Belum dilakukan perhitungan

Berdasarkan tabel 2.2 di atas terlihat kinerja pelayanan yang telah dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2025 rata-rata mencapai hasil baik. Untuk selanjutnya akan diuraikan capaian kinerja per indikator sebagai berikut:

1. Produksi Perikanan Tangkap

Produksi ikan yang berasal dari penangkapan di perairan umum daratan (PUD) untuk tahun 2025 target yang dibebankan yaitu 24.434 ton/tahun. Untuk Triwulan I tahun 2025 jumlah produksi perikanan tangkap telah terealisasi 4.053,20 ton atau sebesar 16,58% dari target 24.434 ton. Produksi Perikanan Tangkap belum optimal karena adanya beberapa wilayah terdampak banjir dan penurunan RTP akibat alih profesi.

2. Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya pada Triwulan I tahun 2025 jumlah produksi perikanan budidaya telah terealisasi 2.660,56 ton atau sebesar 21,95 % dari target 12.119 ton. Produksi perikanan budidaya mengalami penurunan produksi karena karena adanya beberapa wilayah terdampak banjir, beberapa pokdakan sudah tidak aktif lagi atau tidak beroperasi lagi.

3. Tingkat Partisipasi Pokmaswas

Capaian persentase pokmaswas yang aktif Untuk Triwulan I tahun 2025 jumlah pokmaswas yang aktif telah terealisasi sebesar 7,69 % dari target 78%. dikarenakan masih dalam proses persiapan kegiatan.

4. Persentase Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan (%)

Jumlah produksi hasil pengolahan perikanan Untuk Triwulan I tahun 2025 jumlah Persentase Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan telah terealisasi 2% dari target 8 % atau 31,95 Ton dari target 244,33 Ton, dikarenakan Ikan hasil tangkapan masih langka atau sedikit, hal ini menyebabkan harga ikan hasil tangkapan masih tinggi. Hal ini dipicu oleh kondisi sungai-sungai di wilayah kabupaten Muba belum meluap/banjir, sehingga ikan-ikan hasil tangkapan hanya cukup untuk konsumsi segar.

5. Konsumsi Ikan (Kg / Kapita / Tahun)

Pada Triwulan I tahun 2025 belum dihitung karena perhitungannya pertahun.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan PD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut :

- 1) Produktivitas Perikanan Masih Rendah;
 - Rendahnya produktivitas budidaya air tawar dan perikanan tangkap (perairan umum).
 - Masih terbatasnya adopsi teknologi budidaya modern.
 - Biaya produksi budidaya yang tinggi (pakan ikan).
- 2) Sarpas Nelayan Kecil Lemah;

- a. Minimnya bantuan sarana produksi (perahu, mesin perahu, alat tangkap ikan).
- 3) Kesejahteraan Pelaku Utama Perikanan Masih Rendah;
 - a. Pendapatan pembudidaya, nelayan dan pengolah perikanan masih di bawah rata-rata.
 - b. Perlu intervensi nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan pemasaran.
- 4) Degradasi Ekosistem Perairan Umum Daratan;
 - a. Pencemaran Sungai, rawa dan danau berdampak pada stok ikan alami.
 - b. Butuh peningkatan pengawasan, penebaran restocking ikan dan pelestarian habitat.
- 5) Kelembagaan dan SDM Lemah;
 - a. Masih lemahnya kapasitas kelompok pelaku usaha (pokdakan, poklahsar dan KUB).
 - b. Perlunya pelatihan, pendampingan usaha dan penguatan kelembagaan ekonomi perikanan.
- 6) Data Perikanan Kurang Akurat dan Terintegrasi;
 - a. Kurangnya data valid untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan.
 - b. Perlu sistem informasi perikanan yang berbasis digital dan terintegrasi.
- 7) Minat Konsumsi Ikan Belum Maksimal;
 - a. Perlu promosi GEMARIKAN, edukasi gizi ikan dan festival produk olahan.

Tantangan dalam pembangunan di sektor perikanan antara lain :

- 1) Untuk tetap meningkatkan volume produksi perikanan;
- 2) Meningkatkan tingkat konsumsi ikan, dan;
- 3) Meningkatkan produksi olahan hasil perikanan;

Peluang dalam meningkatkan serta menciptakan pembangunan perikanan antara lain :

- 1) Sektor perikanan merupakan salah satu program unggulan;

- 2) Permintaan pasar akan ikan dan produk hasil olahan perikanan;
- 3) Pemanfaatan potensi SDA dan SDM dalam pengembangan agribisnis;
- 4) Komoditas spesifik di sentra produksi cukup banyak;
- 5) Pengembangan infrastruktur di pedesaan masih bisa meningkat;
- 6) Teknologi komunikasi dan informasi mendukung pengembangan agribisnis di pedesaan;
- 7) Pengembangan agribisnis perikanan terbuka luas;
- 8) Kesadaran pembudidaya dalam memanfaatkan sarana produksi perikanan;
- 9) Masih tingginya kebutuhan benih ikan terutama ikan air tawar oleh pembudidaya;

Formulasi Isu-isu penting Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan perikanan yang telah dilakukan dan identifikasi masalah yang ada, ditetapkan isu-isu strategis. Pada Tahun 2026 arah kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin telah mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Isu strategis yang berkaitan dengan bidang Kelautan dan Perikanan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan pengawasan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan umum daratan (PUD);
2. Peningkatan kualitas hasil tangkapan nelayan;
3. Pengembangan produksi perikanan budidaya yang mandiri;
4. Peningkatan teknologi pengolahan hasil perikanan yang berdaya saing;
5. Peningkatan pengetahuan, informasi dan promosi serta sistem pengumpulan dan pengolahan data sektor perikanan;

2.4 Review Terhadap RKPD

Dokumen Renja Dinas Perikanan ini merupakan penjabaran dari dokumen RKPD Kabupaten Musi Banyuasin. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan dalam Renja ini seluruhnya telah mempedomani serta mengikuti program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah diusulkan dalam dokumen RKPD

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Untuk pelaksanaan Renja ini telah diakomodir dalam Dokumen RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 dengan total kebutuhan anggaran sebesar **Rp. 16.446.817.218,-** (***Enam Belas Miliyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah***).

Jika dibandingkan dengan pagu sebelumnya terdapat perbedaan dengan RKPD sebesar Rp.693.774.877,-. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dimana ada penambahan di kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dan pengurangan anggaran khususnya untuk mendukung program strategis Dinas Perikanan.

Untuk lebih jelasnya terkait hasil review terhadap RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 dengan Rancangan Penetapan Perubahan RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan ditampilkan pada tabel 2.3 dibawah :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025
Kabupaten Musi Banyuasin

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan

Lembar.....dari.....

N O	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS PERIKANAN				15.753.042.341					16.446.817.218
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				15.753.042.341	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				16.446.817.218
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				15.753.042.341	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				16.446.817.218
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Akuntabel	100 %	8.688.905.128	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Akuntabel	100 %	10.836.914.794
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	114.282.236	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	51.412.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	77.219.203		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	33.613.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	18.118.033		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	8.775.000
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	18.945.000		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	9.024.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	5.609.097.770	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	8.351.911.103
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	5.609.097.770		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	8.351.911.103

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tersediannya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	52.371.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tersediannya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	52.371.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	52.371.000		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	52.371.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	135.795.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	77.800.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	34.910.000		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	77.800.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	100.885.000		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	77.800.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	989.924.821	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	771.284.407
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.724.080		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.724.080
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	170.737.106		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	159.708.521
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	53.245.105		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	53.245.105
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	198.355.808		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	97.819.780
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	81.884.353		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.555.852
	Penyediaan Bahan/Material									
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.680.000		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.680.000
	Fasilitas Kunjungan Tamu									
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	49.304.369		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	35.780.369
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	279.994.000		-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	172.111.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	109.659.700

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	82.458.001	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	7.593.163
	Pengadaan Mebel									
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	82.458.001		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	7.593.163
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.254.258.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.083.845.121
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	205.458.600		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	288.960.321
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.048.800.000		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	794.884.800
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	450.717.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	440.698.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	340.609.700		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	330.590.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	69.978.000		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	69.978.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit	40.130.000		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit	40.130.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi Perikanan Tangkap	24.434 Ton	2.212.260.350	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi Perikanan Tangkap	24.434 Ton	2.321.105.175
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	100 %	1.917.873.250	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	100 %	2.172.710.125
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan									

		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	1 Dokumen	149.473.000		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	1 Dokumen	67.852.500
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap									
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia</i>	640 Unit	1.768.400.250		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia</i>	990 Unit	2.104.857.625
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		<i>Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil</i>	100 %	294.387.100	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		<i>Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil</i>	100 %	148.395.050
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil									
		Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>	60 Orang	204.704.100		Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>	30 Orang	105.856.050
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil									
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya</i>	2 Kelompok	89.683.000		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya</i>	1 Kelompok	42.539.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi Perikanan Budidaya	27.349 Ton	1.873.464.756	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi Perikanan Budidaya	27.349 Ton	1.998.177.806
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		<i>Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>	100 %	265.091.950	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		<i>Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>	100 %	506.909.000
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil									
		Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas</i>	11 Kelompok	98.230.950		Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas</i>	5 Kelompok	499.824.000

	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan									
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</i>	6 Kelompok	166.861.000		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</i>	0 Kelompok	7.085.000
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		<i>Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>	100 %	1.608.372.806	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		<i>Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>	100 %	1.491.268.806
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
		Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	210 Unit	1.434.156.806		Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	115 Unit	1.362.365.806
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat									
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat</i>	500 Unit	174.216.000		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat</i>	250 Unit	128.903.000
4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Tingkat Partisipasi Pokmaswas	78 %	1.248.411.957	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Tingkat Partisipasi Pokmaswas	78 %	360.784.493
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		<i>Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan</i>	100 %	1.248.411.957	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		<i>Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan</i>	100 %	360.784.493

	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota									
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Napal	<i>Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota</i>	1176 Pelaku Usaha	536.212.000		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Napal	<i>Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota</i>	10 Pelaku Usaha	33.926.000
	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota									
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota</i>	96 Pelaku Usaha	162.548.867		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota</i>	10 Pelaku Usaha	18.319.000
	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota									
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota</i>	7866 Pelaku Usaha	549.651.090		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota</i>	180 Pelaku Usaha	308.539.493
5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Konsumsi Ikan	54,97 Kg/Kap/Th	1.730.000.150	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Konsumsi Ikan	54,97 Kg/Kap/Th	929.834.950
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		-	-	316.710.200	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		-	-	47.268.000
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko									
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin,	<i>Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko</i>	1 Dokumen	316.710.200		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin,	<i>Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko</i>	1 Dokumen	47.268.000
		Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa Kab.					Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa Kab.			

		Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa					. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa			
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		<i>Terlaksananya Penyediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan</i>	100 %	1.413.289.950	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		<i>Terlaksananya Penyediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan</i>	100 %	882.566.950
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	6 Ton	805.669.000		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 Ton	805.669.000
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi</i>	40 Pelaku Usaha	607.620.950		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi</i>	40 Pelaku Usaha	605.775.950
					15.753.042.341					16.446.817.218

Berdasarkan review atas RKPD tahun 2025 dan hasil analisis kebutuhan tahun 2025 pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin dapat diketahui kebutuhan Anggaran tahun 2025 sebesar Rp 16.446.817.218,-. anggaran tersebut akan digunakan sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari Pagu RKPD sebesar Rp 10.836.914.794,-. Anggaran tersebut akan digunakan untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada tahun 2025 membutuhkan anggaran sebesar Rp 2.321.105.175,-. Anggaran tersebut direncanakan akan dipergunakan untuk Penyediaan data dan Informasi Sumber Daya Ikan, Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap sebesar 990 unit, Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil sebanyak 60 orang, dan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 2 Kelompok.
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Tahun 2025 membutuhkan anggaran sebesar Rp 1.998.177.806,- Anggaran tersebut direncanakan akan dipergunakan untuk Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 11 kelompok, untuk 6 kelompok kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, untuk kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 210 unit, Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat 500 Orang.
- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 membutuhkan anggaran sebesar Rp 360.784.493,-. Anggaran tersebut direncanakan akan dipergunakan untuk kegiatan Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota, Pengawasan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan/atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota, Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota

- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2025 membutuhkan anggaran sebesar Rp 929.834.950,-. Anggaran tersebut direncanakan akan dipergunakan untuk Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan, Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6 ton, dan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 40 pelaku usaha.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mekanisme perencanaan sesuai Undang – Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat Edaran Bupati Tentang Jadwal Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan bahwa usulan masyarakat masuk melalui wadah musrenbang tingkat desa, tingkat kecamatan dan dilanjutkan untuk dibahas tingkat kabupaten. Bappeda sebagai pelaksana perencanaan sesuai tugas dan wewenangnya menyusun hasil musrenbang kabupaten, dengan mengakomodir hasil reses dan hasil musrenbang kecamatan dalam RKPD Kabupaten. Sehingga hasil program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD merupakan hasil musyawarah bersama *stakeholders* yang terlibat seperti unsur legislatif, unsur tokoh masyarakat, dunia usaha dan akademisi selanjutnya RKPD dituangkan ke dalam KUA PPAS dengan melihat kemampuan keuangan daerah kemudian dibahas di DPRD sebagai cikal bakal APBD dan adanya tuntutan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan ditingkat desa.

Terhadap usulan masyarakat dan pemangku kepentingan yang diterima oleh Dinas Perikanan dilakukan evaluasi dan verifikasi oleh masing-masing bidang terkait dan selanjutnya jika sesuai dengan kewenangan Dinas Perikanan dan isu strategis yang dihadapi dapat disetujui melalui aplikasi SIPD. Adapun daftar usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat yang diterima melalui aplikasi SIPD Tahun 2025 baik pada saat Musrenbang Tingkat Kecamatan, Rapat Forum Perangkat Daerah dan melalui Hasil Rapat Kerja dengan DPRD berupa pokok-pokok pikiran berdasarkan hasil penjangkaran dari Masyarakat adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Musi Banyuasin

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME		CATATAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Desa Lumpatan II Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	Pengadaan Alat Tangkap Nelayan	1	Paket	Diakomodir
2		Desa Lumpatan Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	Pengadaan Alat Tangkap Nelayan	1	paket	Diakomodir
3		Desa Lumpatan II Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	Pengadaan Alat Tangkap Ikan dan keperluan Nelayan, perahu ketek, mesin ketek, jaring , jala, waring box ikan dan lain-lain	1	Paket	Diakomodir
4		Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	Bantuan Sarana Penangkapan Ikan	1	paket	Diakomodir
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Pandan Sari Kecamatan Tungkal Jaya, Kab. Musi Banyuasin	Bantuan Paket Budidaya Ikan Lele di Kolam Tanah waring dan Bantuan kendaraan bermotor roda tiga	1	paket	Diakomodir

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan hasil evaluasi capaian Renja tahun lalu dan terhadap target yang telah ditetapkan pada rencana strategis empat tahunan. Pada Renja Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin mengajukan usulan kegiatan yang terbagi atas 5 program, 16 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan, antara lain :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota yang terdiri dari sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- b. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - 2) Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil yang terdiri dari sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
 - 2) Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang terdiri dari sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat

3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

- a. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota yang terdiri dari sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pembudidaya Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Pengawasan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan/atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Penangkapan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- a. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil dengan sub kegiatan yaitu:
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang terdiri dari sub kegiatan yaitu:
 1. Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten / Kota
 2. Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Sub Penyediaan Bahan/Material
 - 8) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 9) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 10) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- 3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Selain itu Renja disusun guna mencapai target pada indikator utama Dinas Perikanan yang telah ditetapkan. Seperti yang telah terurai pada bab sebelumnya mengenai analisis capaian kinerja Dinas Perikanan terdapat 5 (lima) indikator.

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2025

N O	TUJUAN	SASARAN	IKK/I KU	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								CATAT AN PENTIN G
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					DINAS PERIKANAN				15.753.042.341,00	16.494.925.674,00	16.446.817.218,00	693.774.877,00			
				3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				15.753.042.341,00	16.494.925.674,00	16.446.817.218,00	693.774.877,00			
				3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				15.753.042.341,00	16.494.925.674,00	16.446.817.218,00	693.774.877,00			
1	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjan Pelaksana Bidang Urusan Perikanan	Persentas e terpenuhinya kebutuha n penunjan g pelaksana an urusan bidang kelautan dan perikanan	IKK	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Akuntabe	100 %	100 %	8.688.905.128,00	8.400.788.461,00	10.836.914.794,00	2.970.039.872,00			
				3.25.01.2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	114.282.236,00	114.282.236,00	51.412.000,00	-62.870.236,00			
				3.25.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokume n	4 Dokume n	77.219.203,00	77.219.203,00	33.613.000,00	-43.606.203,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	
				3.25.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	18.118.033,00	18.118.033,00	8.775.000,00	-9.343.033,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	

				3.25.01.2.0 1.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	1 Data	18.945.000,00	18.945.000,00	9.024.000,00	-9.921.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	
				3.25.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	5.609.097.770,00	5.422.861.103,00	8.351.911.103,00	2.742.813.333,00			
				3.25.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	5.609.097.770,00	5.422.861.103,00	8.351.911.103,00	2.742.813.333,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	
				3.25.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	52.371.000,00	52.371.000,00	52.371.000,00	0,00			
				3.25.01.2.0 3.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	52.371.000,00	52.371.000,00	52.371.000,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	
				3.25.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	135.795.000,00	135.795.000,00	77.800.000,00	-57.995.000,00			
				3.25.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	34.910.000,00	34.910.000,00	0,00	-34.910.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	
				3.25.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	9 Orang	100.885.000,00	100.885.000,00	77.800.000,00	-23.085.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	
				3.25.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	989.924.821,00	989.924.821,00	771.284.407,00	-218.640.414,00			
				3.25.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	65.724.080,00	65.724.080,00	65.724.080,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	
				3.25.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	170.737.106,00	170.737.106,00	159.708.521,00	-11.028.585,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PAJAK DAERAH	
				3.25.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	53.245.105,00	53.245.105,00	53.245.105,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	
				3.25.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	198.355.808,00	198.355.808,00	97.819.780,00	-100.536.028,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	
				3.25.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	81.884.353,00	81.884.353,00	36.555.852,00	-45.328.501,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	
				3.25.01.2.0 6.0007	Penyediaan Bahan/Material										
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.680.000,00	40.680.000,00	40.680.000,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PAJAK DAERAH	
				3.25.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	49.304.369,00	49.304.369,00	35.780.369,00	-13.524.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	
				3.25.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	279.994.000,00	279.994.000,00	172.111.000,00	-107.883.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	
				3.25.01.2.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	109.659.700,00	59.659.700,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	
				3.25.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	82.458.001,00	82.458.001,00	7.593.163,00	-74.864.838,00				
				3.25.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel										
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	1 Unit	82.458.001,00	82.458.001,00	7.593.163,00	-74.864.838,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	

				3.25.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.254.258.600,00	1.152.378.600,00	1.083.845.121,00	-170.413.479,00			
				3.25.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	205.458.600,00	205.458.600,00	288.960.321,00	83.501.721,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	
				3.25.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.048.800.000,00	946.920.000,00	794.884.800,00	-253.915.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	
				3.25.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	450.717.700,00	450.717.700,00	440.698.000,00	-10.019.700,00			
				3.25.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	340.609.700,00	340.609.700,00	330.590.000,00	-10.019.700,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	
				3.25.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	69.978.000,00	69.978.000,00	69.978.000,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	
				3.25.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit	54 Unit	40.130.000,00	40.130.000,00	40.130.000,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	
2	Meningkatkan Produktivitas Sektor Perikanan dan Meningkatkan Kontribusi Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan	Meningkatnya Produksi Perikanan	IKU	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	24.434 Ton	24.434 Ton	2.212.260.350,00	2.837.260.350,00	2.321.105.175,00	1.287.739.650,00			
				3.25.03.2.0 1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	100 %	100 %	1.917.873.250,00	2.542.873.250,00	2.172.710.125,00	254.836.875,00			
				3.25.03.2.0 1.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan										

	Perikanan				<i>Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	149.473.000,00	149.473.000,00	67.852.500,00	-81.620.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	
			3.25.03.2.0 1.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap										
					<i>Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia</i>	640 Unit	990 Unit	1.768.400.250,00	2.393.400.250,00	2.104.857.625,00	336.457.375,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	
			3.25.03.2.0 2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil</i>	100 %	100 %	294.387.100,00	294.387.100,00	148.395.050,00	-145.992.050,00			
			3.25.03.2.0 2.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil										
					<i>Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>	60 Orang	30 Orang	204.704.100,00	204.704.100,00	105.856.050,00	-98.848.050,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	
			3.25.03.2.0 2.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil										
					<i>Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya</i>	2 Kelompok	1 Kelompok	89.683.000,00	89.683.000,00	42.539.000,00	-47.144.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	
3			3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	27.349 Ton	27.349 Ton	1.873.464.756,00	2.278.464.756,00	1.998.177.806,00	1.919.535.244,00			
			3.25.04.2.0 2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	<i>Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>	100 %	100 %	265.091.950,00	265.091.950,00	506.909.000,00	241.817.050,00			
			3.25.04.2.0 2.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil										

						Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	11 Kelompo k	5 Kelompo k	98.230.950,00	98.230.950,00	499.824.000,00	401.593.050,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	
				3.25.04.2.0 2.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan										
						Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	6 Kelompo k	0 Kelompo k	166.861.000,00	166.861.000,00	7.085.000,00	-159.776.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	
				3.25.04.2.0 4	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100 %	100 %	1.608.372.806,00	2.013.372.806,00	1.491.268.806,00	-117.104.000,00			
				3.25.04.2.0 4.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	210 Unit	115 Unit	1.434.156.806,00	1.839.156.806,00	1.362.365.806,00	-71.791.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	
				3.25.04.2.0 4.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat										
						Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	500 Unit	250 Unit	174.216.000,00	174.216.000,00	128.903.000,00	-45.313.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin,	DANA BAGI HASIL (DBH)	

													Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa		
4				3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tingkat Partisipasi Pokmaswas	78 %	78 %	1.248.411.957,00	1.248.411.957,00	360.784.493,00	2.501.588.043,00			
				3.25.05.2.0 1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan</i>	100 %	100 %	1.248.411.957,00	1.248.411.957,00	360.784.493,00	-887.627.464,00			
				3.25.05.2.0 1.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota										
						<i>Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota</i>	1176 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	536.212.000,00	536.212.000,00	33.926.000,00	-502.286.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Napal	DANA BAGI HASIL (DBH)	
				3.25.05.2.0 1.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota										
						<i>Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota</i>	96 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	162.548.867,00	162.548.867,00	18.319.000,00	-144.229.867,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	
				3.25.05.2.0 1.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota										
						<i>Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota</i>	7866 Pelaku Usaha	180 Pelaku Usaha	549.651.090,00	549.651.090,00	308.539.493,00	-241.111.597,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	

5				3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Ikan	54,97 Kg/Kap/Th	54,97 Kg/Kap/Th	1.730.000.150,00	1.730.000.150,00	929.834.950,00	469.999.850,00			
				3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	-	316.710.200,00	316.710.200,00	47.268.000,00	-269.442.200,00			
				3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko										
						<i>Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	316.710.200,00	316.710.200,00	47.268.000,00	-269.442.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	
				3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Terlaksananya Penyediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan</i>	100 %	100 %	1.413.289.950,00	1.413.289.950,00	882.566.950,00	-530.723.000,00			
				3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										

						Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Ton	2 Ton	805.669.000,00	805.669.000,00	276.791.000,00	-528.878.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkai Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		
				3.25.06.2.0 3.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	607.620.950,00	607.620.950,00	605.775.950,00	-1.845.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		
					J U M L A H				15.753.042.341,00	16.494.925.674,00	16.446.817.218,00	693.774.877,00				

BAB V

PENUTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Renstra Dinas Perikanan Tahun 2023-2026 dan dengan mempedomani Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah. Rancangan Rencana kerja dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan prioritas program dan sebagai alat pengendali dalam menyelaraskan program kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan bertitik tolak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dinamis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. Ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain sebagai berikut :

- 1) Perlu penambahan aparatur yang kompeten dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, hal ini untuk optimalisasi produksi perikanan sehingga menambah peluang peningkatan pendapatan asli daerah;
- 2) Penguatan koordinasi lintas sektor yang berkewenangan penyidikan guna optimalisasi perlindungan sumberdaya ikan di perairan umum daratan;
- 3) Perlu membangun kerjasama dengan pihak ketiga terkait pelaksanaan kegiatan produksi benih ikan;
- 4) Menyusun rencana-rencana inovasi yang lebih konkret dan memberi solusi jangka pendek dan menengah atas produksi perikanan yang cukup.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaannya

Dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam rencana kerja tetap mengikuti kaidah-kaidah pelaksanaan, mulai dari penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2025.

1. Dasar Hukum Pelaksanaan

- UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Permendagri No. 86 tahun 2017
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan
- Dokumen Perubahan RKPD Tahun Berjalan

2. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan

- Efisiensi dan efektivitas anggaran
- Partisipatif dan anggaran
- Akuntabilitas kinerja
- Berbasis hasil dan prioritas daerah
- Responsif terhadap isu strategis, termasuk keberlanjutan sumber daya perikanan

3. Sinkronisasi dan Integrasi Program

- Keselarasan antara program Dinas Perikanan dengan RKPD
- Koordinasi antar bidang dalam dinas, antar OPD dan stakeholder (Pokdakan, Nelayan, Pokmaswas dan Poklahsar)

4. Penganggaran

- Penyesuaian pagu anggaran berdasarkan perubahan RKPD
- Skema pembiayaan
- Alokasi belanja langsung dan tidak langsung
- Penyusunan RKA dan DPA yang sesuai dengan perubahan renja

5. Pelaksanaan Kegiatan

- Penjadwalan ulang kegiatan pergeseran
- Penyesuaian output dan outcome kegiatan
- Mekanisme pelibatan masyarakat perikanan

6. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

- Sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja

- Indikator capaian kinerja program dan kegiatan
 - Tindak lanjut hasil evaluasi
7. Penyesuaian Jika Terjadi Perubahan
- Ketentuan dalam hal terjadi perubahan kebijakan daerah
 - Prosedur revisi RKA dan DPA
8. Penutup
- Pernyataan bahwa kaidah ini menjadi pedoman operasional pelaksanaan Perubahan Renja Dinas
 - Komitmen terhadap pencapaian target kinerja dan pelayanan public sektor perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan 40 Sub Kegiatan rincian rencana kerja anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta prosedur pengadaan barang dan jasa pada anggaran induk, dan setelah pembahasan anggaran perubahan terdapat sebanyak 25 Sub kegiatan yang mengalami perubahan.

C. Rencana Tindak Lanjut

1. Koordinasi dengan BKPSDM perihal penambahan pegawai.
2. Koordinasi dengan pihak berwenang dalam penyidikan dan menjaga Perairan Umum Daratan (PUD).
3. Mengajukan usulan anggaran terkait beberapa kegiatan 2025 yang tertunda dan adanya perubahan arah kebijakan Pemerintah Daerah terutama : Kegiatan Bantuan Terhadap Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Penetapan Perubahan Rencana kerja ini dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan prioritas program dan sebagai alat pengendali dalam menyelaraskan program kerja yang telah digariskan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang bertitik tolak pada pemenuhan kebutuhan Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2025. Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin dengan masyarakat yang bersifat dinamis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan rencana kerja ini didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026. Untuk

menjalankan rencana kerja sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta dukungan sarana dan prasarana.

Arah kebijakannya adalah meningkatkan produksi perikanan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengedepankan pembangunan berbasis pelestarian lingkungan. Pencapaian ini tidak akan tercapai tanpa dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan seluruh aparatur Dinas Perikanan. Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu, 26 Juni 2025

Kepala Dinas Perikanan



Hendra Tris Tomy, S.STP, M.Ec.Dev

Pembina Utama Muda

NIP. 19770902 199602 1 001